



# LAPORAN TAHUNAN T.A. 2025 PENGELOLAAN RISIKO

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA DENPASAR

**OLEH:**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR**  
**JL. GAJAH MADA NOMOR 1 DENPASAR**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital  
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:  
[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202601/tte-19478daf0389e8a3314a6a695aaaefce2\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202601/tte-19478daf0389e8a3314a6a695aaaefce2_conv.pdf)



ပီပီဂီၵွၵ်ႈ ၵူၼ်း ၵူၼ်း  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
ၵူၼ်း ၵူၼ်း ၵူၼ်း  
**SEKRETARIAT DAERAH**

တၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈတၢ်ပူၼ်ႈ  
Jl. Gajah Mada No. 1 Denpasar, Telepon. (0361) 234831 Fax (0361) 221534  
Laman : [www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id), Pos-el : [setda@denpasarkota.go.id](mailto:setda@denpasarkota.go.id)

---

**LAPORAN TAHUNAN T.A. 2025 PENGELOLAAN RISIKO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA DENPASAR**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah, melalui pengelolaan risiko keseluruhan kegiatan kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah akan terkelola dengan runtun. Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar menilai risiko yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah di Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Denpasar kota berbudaya dilandasi Tri Hita Karana.

**B. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah

### **C. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Sekretariat Daerah Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

**BAB II**  
**RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR**

**A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025**

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 14 risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 (dari Form 4).

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 14 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 risiko (0% dari 14 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 2 (dari Form 5).

b. Seluruh prioritas telah memiliki *existing control* (sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas). (Pada form 7)

c. Sebanyak 0 risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 3 (dari form 7).

**B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Sekretariat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025**

a. Kegiatan pengendalian

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada Tahun 2025 sebanyak 0 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4 (dari form 8).

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Tahun 2025 sebanyak 0 atau 100% dari 0 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5 (dari form 9).

3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

### **BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dari 14 risiko yang teridentifikasi pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar, keterjadian risiko sebanyak 2 risiko. Terkait dengan rincian terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 10.

## **BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP**

### **A. Pemantauan Keterjadian Risiko**

Terdapat 2 kejadian risiko yang muncul pada Tahun 2025. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 (dari form 10).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan pengelolaan risiko yang berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju serta pembangunan secara berkelanjutan. Sekretariat Daerah Kota Denpasar memiliki sasaran strategis dimana mengoptimalkan tata kelola Pemerintah Kota Denpasar baik di bidang Pelayanan Kepemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta bidang Pelayanan Administrasi Umum yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama melalui Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian Tugas dan Kebijakan Pemerintah. Strategi dari tindak lanjut pengelolaan risiko adalah dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala ke bidang-bidang teknis yang mengampu kinerja Sekretariat Daerah guna meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja Kota Denpasar.

Denpasar, 2 Januari 2026

**Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh**  
Pj, Sekretaris Daerah Kota Denpasar



**Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680924 199303 1 010

LAMPIRAN 1 (DARI FORM 4)

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>				
	Sekretariat Daerah tidak masuk dalam skup risiko pemda				
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
	<b>Nama OPD : Setda Kota Denpasar</b>				
1	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administrasi umum	RSO.25.33.02.01	2	2	4
2	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administratif pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	RSO.25.33.02.02	2	2	4
3	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administratif perekonomian dan pembangunan	RSO.25.33.02.03	2	2	4
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
	<b>Nama OPD : Setda Kota Denpasar</b>				
1	Kurangnya komitmen OPD dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dan MoU Sister City	ROO.25.33.02.4	3	2	6

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
2	Munculnya pemberitaan yang negatif tentang Pemerintah Kota Denpasar di Media Massa	ROO.25.33.02.1	3	2	6
3	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang terlambat dan tidak sesuai	ROO.25.33.02.2	2	2	4
4	Kerusakan pada bangunan gedung rumah jabatan dan gedung kantor Sekretariat Daerah	ROO.25.33.02.3	2	2	4
5	Tidak tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	ROO.25.33.02.5	4	1	4
6	Ranperda dan Ranperwali yang dibahas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	ROO.25.33.02.6	2	2	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
7	Koordinasi Permasalahan hukum yang tidak berjalan optimal	ROO.25.33.02.7	2	2	4
8	Proses mengidentifikasi laporan realisasi fisik dan keuangan membutuhkan kecermatan dan waktu relatif panjang	ROO.25.33.02.9	2	2	4
9	Kesalahan Evaluasi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	ROO.25.33.02.10	2	2	4
10	Pemahaman Pegawai/Staf terkait Kelengkapan dan Mekanisme Pengajuan Proposal Hibah Masih Kurang	ROO.25.33.02.8	2	2	4
11	Pengumpulan Laporan Triwulan TPID ke pusat terlambat dilaksanakan (Tahap Pelaporan)	ROO.25.33.02.11	2	2	4
<b>IV</b>	<b>Risiko Fraud OPD</b>				

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
<b>Nama OPD : Setda Kota Denpasar</b>					
1	PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.3	2	2	4
2	Penyusunan laporan pertanggung jawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.33.02.10	2	2	4
3	Pejabat menetapkan kebijakan sesuai kehendak pribadi	RF.25.33.02.7	2	2	4
4	PA/KPA, PPK dan Pelaksana kegiatan menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	RF.25.33.02.8	2	2	4
5	Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan	RF.25.33.02.9	2	2	4
6	Kurang cermat nya dalam memfasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah	RF.25.33.02.15	2	2	4
7	Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.16	2	2	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
8	Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.18	2	2	4
9	Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.22	2	2	4
10	Tindaklanjut penyesuaian Laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.33.02.23	2	2	4
11	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar.	RF.25.33.02.25	2	2	4
12	Spesifikasi Teknis Mengarah kepada produk/rekanan tertentu	RF.25.33.02.26	4	1	4
13	Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi	RF.25.33.02.27	4	1	4
14	Terbatasnya calon penyedia pada etalase katalog lokal	RF.25.33.02.28	4	1	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
15	Persiapan pemilihan penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi tanpa disertai referensi harga	RF.25.33.02.29	4	1	4
16	Perencanaan pembuatan Buku Evaluasi BUMD dan Buku Evaluasi BLUD dengan pihak ketiga belum optimal (Tahap Perencanaan)	RF.25.33.02.31	2	2	4
17	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar (Tahap Pertanggungjawaban)	RF.25.33.02.32	2	2	4
18	Pemilihan rekanan / penyedia barang dan jasa telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hubungan kedekatan	RF.25.33.02.1	2	1	2
19	Penyusunan Laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.33.02.2	2	1	2
20	Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.4	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
21	Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.5	2	1	2
22	Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.12	2	1	2
23	Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.13	2	1	2
24	Melakukan pemalsuan data dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.25.33.02.19	2	2	2
25	Salah saji material dan data keuangan palsu	RF.25.33.02.20	2	1	2

**LAMPIRAN 2 (DARI FORM 5)**

**Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
	<b>Nama OPD : Setda Kota Denpasar</b>					
	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					
	<b>Nama OPD : Setda Kota Denpasar</b>					
	-	-	-	-	-	-

**LAMPIRAN 3 (DARI FORM 7)**

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
	<b>Nama OPD : Setda Kota Denpasar</b>						
	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>						
	<b>Nama OPD : Setda Kota Denpasar</b>						
	-	-	-	-	-	-	-

**LAMPIRAN 4 (DARI FORM 8)**

**Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Pengendalian yang Dibangun**

Nama Pemda		: Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar						
	-	-	-	-	-	-	-
III	Risiko Operasional						
	Nama OPD : Setda Kota Denpasar						
	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 5 (DARI FORM 9)

**Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan**

Nama Pemda	: Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kota Denpasar					
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No.	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
	<b>Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Denpasar</b>					
	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional</b>					
	<b>Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Denpasar</b>					
	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 6 (DARI FORM 10)

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>									
	Sekretariat Daerah tidak masuk dalam skup risiko pemda									
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>									
	Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Denpasar									
1	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administrasi umum	RSO.25.33.02.01	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi atas Standar Pelayanan, SOP yang terjabarkan dibawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum (Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan	Terjabarkan pada masing-masing kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum	Terjabarkan pada masing-masing kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai progres pada masing-masing kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum . Dokumentasi berupa notulen

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
							Komunikasi Pimpinan)			
2	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan administratif pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	RSO.25.33.02.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi atas Standar Pelayanan, SOP terjabarkan dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama)	Terjabarkan pada masing-masing kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Terjabarkan pada masing-masing kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai progres pada masing-masing kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat . Dokumentasi berupa notulen
3	Belum optimalnya koordinasi kebijakan pelayanan	RSO.25.33.02.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi atas Standar Pelayanan, SOP	Terjabarkan pada masing-masing kegiatan dibawah	Terjabarkan pada masing-masing kegiatan dibawah	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai progres

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
	administratif perekonomian dan pembangunan						terjabarkan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa)	Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	pada masing-masing kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Dokumentasi berupa notulen
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>									
Nama OPD : Sekretariat Daerah Kota Denpasar										
1	Belum optimalnya tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama, Memorandum Saling Pengertian (MoU) Sister	ROO.25.33.02.4	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan Pihak Terkait	Triwulan IV	Dilaksanakan pada Triwulan IV	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
	City, Rencana Kerja Tahunan (RKT).									
2	Munculnya pemberitaan yang negatif tentang Pemerintah Kota Denpasar di Media Massa	ROO.25.33.02.1	10 Maret 2025	Pemberitaan dengan Narasi tidak berdasar yang diarahkan langsung ke Walikota Denpasar pada Sosial Media Facebook	Penggiringan informasi negatif dapat terjadi pada masyarakat kota Denpasar	Pemberitaan muncul pada Media Sosial Facebook	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui akun resmi Bagian Prokopim telah melakukan klarifikasi dengan pernyataan yang berdasarkan data dan fakta	Setiap Triwulan 2024	Setiap Triwulan 2024	Sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti
			10 September 2025	Munculnya narasi-narasi liar terkait bencana banjir yang terjadi di Kota Denpasar	Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Denpasar menurun terkait penanganan pasca bencana	Pemberitaan muncul di beberapa media massa	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui akun resmi Bagian Prokopim dan media-media yang bekerjasama dengan	Setiap Triwulan 2025	Setiap Triwulan 2025	Sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
3	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang terlambat dan tidak sesuai	ROO.25.33.02.2	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	- Melaksanakan pembinaan secara berkala terkait Kebijakan Pelayanan	Triwulan I, II, III dan IV	Triwulan I, II, III dan IV	Sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
							Publik dan Tata Laksana terbaru - Melaksanakan pembinaan terhadap pelayanan publik dan tata laksana			
4	Kerusakan pada bangunan gedung rumah jabatan dan gedung kantor Sekretariat Daerah	ROO.25.33.02.3	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan pengecekan rutin dan memastikan gedung bangunan rumah jabatan dan gedung kantor masih layak pakai	Triwulan IV 2025	Triwulan IV 2025	Dilaksanakan pada Triwulan IV
5	Tidak tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	ROO.25.33.02.5	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Meningkatkan koordinasi ketersediaan dokumen pendukung dari Perangkat Daerah terkait agar tersusun/ tersedianya	Triwulan I, II, III dan IV	Triwulan I, II, III dan IV	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti di Triwulan I dan dilanjutkan di triwulan II, III dan IV

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
							Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
6	Ranperda dan Ranperwali yang dibahas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	ROO.25.33.02.6	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah dan Tim Penasehat Hukum Kota Denpasar yang berkaitan dalam pelaksanaan penyusunan peraturan Perundang-undangan	Triwulan I, II, III dan IV	Triwulan I, II, III dan IV	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti di Triwulan I dan II serta dilanjutkan di Triwulan III dan IV
7	Koordinasi Permasalahan hukum yang tidak berjalan optimal	ROO.25.33.02.7	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan Koordinasi dan komunikasi Penyelesaian sengketa hukum	Triwulan I, II, III dan IV	Triwulan I, II, III dan IV	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti di Triwulan I dan II serta dilanjutkan di

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
										Triwulan III dan IV
8	Proses mengidentifikasi laporan realisasi fisik dan keuangan membutuhkan kecermatan dan waktu relatif panjang	ROO.25.33.02.9	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi koordinasi dengan Perangkat Daerah	Setiap Triwulan 2025	Setiap Triwulan 2025	Telah sepenuhnya dilaksanakan dan ditindak lanjuti
							Evaluasi atas tindaklanjut Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Triwulan IV 2025	Desember 2025	Telah sepenuhnya dilaksanakan dan ditindak lanjuti
							Evaluasi atas implementasi SOP Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Denpasar melalui Koordinasi dengan	Triwulan IV 2025	Desember 2025	Telah sepenuhnya dilaksanakan dan ditindak lanjuti

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
						Perangkat Daerah agar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah bisa tepat waktu, mutu dan sasaran				
						Evaluasi atas implementasi SOP Rapat Evaluasi Triwulan	Triwulan IV 2025	Desember 2025	Telah sepenuhnya dilaksanakan dan ditindak lanjuti	
9	Kesalahan Evaluasi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	ROO.25.33.02.10	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Dalam melakukan evaluasi, Pokmil selalu berpedoman pada Peraturan Pengadaan	Triwulan I	Triwulan I	Dilaksanakan kegiatan sosialisasi pada bulan Februari 2025

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
							Barang/Jasa Pemerintah			
10	Pemahaman Pegawai/Staf terkait Kelengkapan dan Mekanisme Pengajuan Proposal Hibah Masih Kurang	ROO.25.33.02.8	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Melakukan Pembinaan dan Rapat Internal pada Pegawai/Staf serta membuat pedoman terkait Kelengkapan dan Mekanisme Pengajuan Proposal untuk Hibah Anggaran Induk 2026 dan Anggaran Perubahan 2026	Triwulan I	Januari 2025	Dilaksanakan Pembinaan dan Rapat Internal pada Bulan Januari 2025

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
11	Pengumpulan Laporan Triwulan TPID ke pusat terlambat dilaksanakan (Tahap Pelaporan)	ROO.25.33.02.11	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan pengendalian inflasi daerah	Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV	Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV	Telah dilaksanakan dan ditindak lanjuti

Denpasar, 2 Januari 2026

**Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh**

Pj, Sekretaris Daerah Kota Denpasar



**Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulva, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680924 199303 1 010